

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan Internasional merupakan salah satu aspek yang penting dalam perekonomian setiap negara di dunia. Adanya perdagangan Internasional, perekonomian akan saling terjalin dan tercipta suatu hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi suatu negara dengan negara lain serta lalu lintas barang dan jasa akan membentuk perdagangan antar bangsa. Perdagangan Internasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Terjadinya perekonomian dalam negeri dan luar negeri akan menciptakan suatu hubungan yang saling mempengaruhi antara suatu negara dengan negara lainnya, salah satunya adalah berupa pertukaran barang dan jasa antar negara. Dalam keterbatasan factor-faktor produksi dalam kegiatan perekonomian, memaksa pemerintah Jepang mengambil beberapa pilihan, salah satunya adalah perdagangan internasional impor. Sedangkan Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya membuat pemerintah Indonesia melakukan perdagangan Internasional yaitu ekspor untuk memenuhi kebutuhan beberapa negara salah satunya adalah Jepang.

Jepang merupakan mitra dagang utama Indonesia yang berada di urutan kedua setelah Amerika Serikat sebagai tujuan ekspor Indonesia dengan nilai total ekspor 17,2 miliar USD (Agustinus, 2013). Sejauh ini Indonesia memiliki banyak komoditi non-migas yang cukup menjadi andalan untuk diekspor ke pasaran Jepang. Ada kurang lebih sekitar 50 komoditi non-migas yang memasuki pasaran Jepang. Komoditi yang masih potensial untuk dapat ditingkatkan ekspornya, termasuk oleh UKM, ke pasaran Jepang antara lain souvenir, hasil perikanan, hasil pertanian seperti kopi, teh, coklat dan rempah-rempah, produk makanan, produk hasil tanaman, batik dan tenun ikat, disamping produk pertambangan seperti tembaga dan nikel, elektronik, mebel, karet, pakaian, plywood, kertas dan sebagainya.

Indonesia sebagian negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah termasuk, kekayaan laut, Indonesia memiliki berbagai jenis ikan yang tersebar di perairan Indonesia. Bersarnya jumlah ikan yang ada di perairan Indonesia menjadikannya sebagai salah satu komoditi ekspor yang sangat

diandalkan dalam meningkatkan devisa negara. Komoditas ekspor produk perikanan Indonesia meliputi udang, tuna, kerapu, kakap, tenggiri, tilapia, cephalopoda (squid, cotopus, cuttlefish), daging kepiting ranjungan, kepiting, rumput laut, teripang, lobster. Komoditas tersebut diolah menjadi produk perikanan berupa produk akhir. Jepang merupakan pasar potensial bagi produk ekspor Indonesia karena Jepang merupakan pasar dominan di dunia yang banyak menanamkan investasinya. Sedangkan Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor di bidang perikanan terbesar di dunia. Hasil dari kekayaan alam tersebut dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara guna pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia perlu melakukan pengelolaan yang baik dan benar secara internal maupun eksternal dengan bekerja sama dengan negara lain.

Jepang merupakan negara yang memiliki tingkat konsumsi ikan terbesar di dunia yaitu 110 kg pertahunnya (Ariyanti, 2016). Dengan tingginya tingkat konsumsi tersebut membuat Jepang mengimpor ikan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu negara pengimpor ikan terbesar untuk Jepang adalah Indonesia. Sejauh ini negara – negara yang mengekspor tuna ke Jepang adalah Australia, Taiwan, Korea Selatan, Indonesia, Thailand dan negara lainnya (Satria, 2009).

Jepang merupakan salah satu negara yang tertarik dengan sumber daya alam laut yang ada di Indonesia, terutama ikan tuna. Oleh karena kebutuhan Jepang akan impor sumber daya perikanan dari Indonesia, tahun 2007 lalu Indonesia dan Jepang melakukan kerjasama ekonomi dalam kerangka kerjasama *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* yang mulai berlaku efektif di tahun 2008. Perjanjian tersebut disusun guna menghasilkan manfaat bagi kedua pihak secara adil, seimbang, dan terukur melalui liberisasi akses pasar, fasilitasi, dan kerjasama melalui pengembangan kapasitas untuk sector-sektor industry prioritas. Dimana kerjasama ini sekiranya dapat menguntungkan di kedua belah pihak, yaitu Jepang terpenuhi kebutuhan akan ikan tunanya dan Indonesia pun dapat menunjang pertumbuhan ekonominya dari hasil impor ikan tuna ke Jepang. Namun, ternyata kerjasama ini telah memunculkan adanya isu overfishing. Kondisi tersebut tentu sangat mengkhawatirkan karena secara ekonomi dapat menimbulkan inefisiensi serta penurunan stok sumber daya perikanan (www.endonesia.com). Selain itu, hal

ini juga dapat mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang (Larasati, 2015).

Grafik I.1 Ekspor Tuna Indonesia ke Jepang



Sumber : BPS di olah penulis

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa ekspor Tuna Indonesia ke Jepang mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2010 – 2014. Ekpor tuna pada tahun 2010 sebesar 30,282.30 ton ditahun 2011 ekspor meningkat menjadi 35,010.20 ton pada tahun 2012 menurun menjadi 29,236.60 ton, tahun 2013 meningkat kembali menjadi 33,116.60 dan pada tahun 2014 ekspor mengalami penurunan kembali yaitu 25,118.10 ton. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan untuk terus meningkatkan ekspor Tuna ke Jepang.

Penurunan yang terjadi pada tahun 2012 disebabkan dengan cuaca yang buruk yang membuat ekspor produk ikan tuna menurun. Selain permasalahan cuaca, kelangkaan pasokan ikan tuna juga disebabkan juga disebabkan persoalan lain. Ketua Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) mengatakan, aturan pengambilan langsung subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) juga ikut mendorong berkurangnya hasil tangkapan ikan tuna (Handoyo, 2012) . Sedangkan penurunan yang terjadi

pada tahun 2014 disebabkan dengan adanya penurunan daya beli masyarakat Jepang, perlambatan ekonomi, penurunan nilai tukar yen terhadap dolar hingga besaran tarif bea masuk. Penurunan yang terjadi 2012 dan 2014 juga dikarenakan masalah biaya pengiriman yang sangat tinggi, dari pengepul di berbagai daerah sampai ke eksportir. Selain itu juga, akibat keterbatasan fasilitas infrastruktur pengiriman ikan dari daerah ke beberapa eksportir sehingga menyebabkan kualitas tuna menjadi turun dan tentunya berdampak terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Eksploitasi ikan tuna merupakan salah satu permasalahan yang timbul dari berlakunya kerjasama IJEPA. Namun, masih ada beberapa masalah lain yang mendorong agar kebijakan ini segera di evaluasi. Masalah-masalah tersebut antara lain mengenai timpangnya perdagangan antara Indonesia dan Jepang, standarisasi produk barang atau jasa yang masuk ke Jepang cukup sulit, terjadinya krisis di berbagai bidang, dan jadwal penurunan tarif yang tidak tepat waktu.

Jepang yang menerapkan hambatan tarif terhadap impor perikanan Indonesia ternyata memberatkan bagi Indonesia. Tariff bea masuk yang di berlakukan Jepang terhadap impor tuna Indonesia sebesar 9,6% (Satria, Anggraini, & Solihin, *Globalisasi Perikanan: Resposisi Indonesia?*, 2009). Dalam IJEPA meminta untuk penurunan dan penghapusan tarif bea masuk produk perikanan. Berdasarkan kesepakatan IJEPA, penurunan tariff bea masuk akan dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu:

1. Fast track

Diturunkan menjadi nol persen sejak penandatanganan kesepakatan.

2. Normal track

Diturunkan menjadi nol persen selama kurun waktu maksimal 10 tahun.

3. Special arrangement

Negosiasi ulang atau melalui proses penghapusan tariff yang disepakati kedia negara.

4. Exclusion list

Produk tertentu yang tidak dimasukan dalam skema perundingan.

Melalui kesepakatan bilateral ini, Indonesia dapat meningkatkan volume dan nilai ekspor ke Jepang dan begitupun sebaliknya, khususnya bagi produk

perikanan, dimana Jepang merupakan salah satu negara tujuan utama bagi produk-produk perikanan Indonesia (Satria, Anggraini, & Solihin, Globalisasi Perikanan: Resposisi Indonesia?, 2009).

Namun sampai saat ini, tariff bea masuk ikan tuna Indonesia untuk mencapai 0% belum juga terjadi. Itulah mengapa ekspor ikan tuna Indonesia mengalami penurunan dan kenaikan pada periode 2010 – 2014.

I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Ekspor Tuna ke Jepang Periode 2010 – 2014?”

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

- Untuk menjelaskan penyebab penurunan ekspor ikan tuna Indonesia ke Jepang periode 2010 – 2014.
- Untuk menjelaskan bagaimana diplomasi Indonesia dalam menyikapi penurunan ekspor tuna ke Jepang periode 2010- 2014.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

- Secara akademis, penelitian ini memberikan suatu informasi dan data di dalam perdagangan internasional untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hambatan yang terjadi dalam ekspor tuna Indonesia ke Jepang yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa Hubungan Internasional dalam melengkapi karya tulisnya.
- Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan mengenai bagaimana diplomasi Indonesia dalam meningkatkan ekspor tuna ke Jepang.

I.5 Tinjauan Pustaka

Dari penelitian yang akan penulis tulis terdapat tiga bahan yang terkait dengan penelitian yang akan diambil penulis, yaitu :

Referensi pertama dalam Artikel yang berjudul “*Analisis Ekspor Ikan Tuna Indonesia*” oleh Indriana Yudiarso, dari artikel Wacana Vol 12, 2009. Indriana menjelaskan mengenai berbagai factor mempengaruhi terhadap ekspor ikan tuna Indonesia dan strategi pemasaran ekspor ikan tuna Indonesia. Indriana menyatakan bahwa ditinjau dari nilainya, ekspor ikan tuna Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

Indriana berargumen bahwa promosi merupakan salah satu upaya pengenalan produk dan sekaligus membentuk citra produk di hadapan konsumen yang kemudian akan meningkatkan volume penjualan. Promosi melibatkan banyak pihak dan biayanya yang cukup tinggi namun itu semua bila dilakukan dengan tepat akan mendatangkan keuntungan yang besar. Untuk itu, agar meningkatkan volume ekspor produk ikan tuna dan memperluas konsumen maka promosi dagangnya bukan hanya merujuk konsumen tapi mengarah lebih memberi keyakinan akan nilai dan manfaat produk ikan tuna Indonesia. Hal ini mendapatkan dukungan produk perdagangan yang mewakili Indonesia di negara-negara yang telah menjadi tujuan ekspor Indonesia, maupun negara lain yang terbuka peluangnya untuk dimasuki pasar ekspor ikan tuna Indonesia.

Dalam tulisan Indriana menunjukkan bahwa ekspor ikan tuna Indonesia berhubungan positif dan sangat responsive terhadap perubahan harga ekspor ikan tuna. Selain itu juga harus diperhatikan pajak ekspor tuna yang tidak memberatkan produsen namun juga tidak merugikan pemerintah. Nilai tukar rupiah juga berpengaruh negatif terhadap ekspor ikan tuna, diperlukan upaya pengadaan faktor produksi lokal yang bermutu agar biaya produksi bisa ditekan. Dalam upaya promosi juga dapat membantu dalam meningkatkan ekspor agar negara-negara importir dapat menikmati hasil tuna Indonesia.

Artikel milik Indriana membantu penulis untuk menyediakan data-data strategi untuk meningkatkan ekspor tuna Indonesia ke Jepang. Didalam artikel ini menggunakan perencanaan strategi pemasaran dengan SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*). Perbedaan artikel ini dengan penulis, di artikel ini

memfokuskan pada nilai ekspor nya, dan untuk meningkatkan ekspor tuna Indonesia dalam artikel ini lebih focus terhadap promosi menurut Indriana. Sedangkan penulis untuk meningkatkan ekspor ikan tuna Indonesia memfokuskan kepada kerjasama antar negara dan kebijakan dan strategi yang diambil Indonesia untuk meningkatkan ekspornya.

Referensi kedua dari skripsi yang berjudul "*Analisis Dampak Non-Tariff Measures (NTMs) Terhadap Ekspor Ikan Tuna Indonesia Ke Negara Tujuan Utama*", oleh Oktavina Widya Kristiana pada tahun 2015, Institut Pertanian Bogor. Oktaviana menjelaskan tentang perdagangan internasional yang mengalami hambatan baik tariff maupun non tariff. Dan bagaimana ekspor tuna Indonesia menghadapi hambatan NTM.

Dalam tulisan Oktavina mengarah pada tujuan penerapan kebijakan perdagangan sebagai proteksi atau menatasi kegagalan pasar, NTMs diperkirakan memiliki efek distorsi pada perdagangan internasional. Kebijakan non tariff yang ditetapkan oleh negara-negara pengimpor komoditi justru memberikan hambatan baru dalam perdagangan internasional dan membatasi akses pasar menggantikan kebijakan tariff. Adanya regulasi teknis dan standar produk misalnya, dapat meningkatkan biaya perdagangan melalui dua cara. Pertama, meningkatkan beban biaya tetap bagi eksportir yang harus menyesuaikan produk dengan standar dan regulasi yang diberlakukan oleh negara pengimpor. Kedua prosedur penilaian kesesuaian seperti pengujian untuk menunjukkan bahwa satu produk telah sesuai dengan regulasi teknis juga dapat menjadi biaya tambahan.

Komoditi tuna merupakan salah satu penyumbang terbesar nilai hasil ekspor perikanan Indonesia. Angka pertumbuhan baik dalam segi nilai ekspor maupun produksi menunjukkan potensi ekspor yang besar untuk komoditas ikan tuna. Akan tetapi, penerapan hambatan non tariff pada komoditas tuna oleh negara pengimpor NTMs mengharuskan Indonesia memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi dan secara tidak langsung berdampak bagi peningkatan biaya perdagangan komoditas tersebut. Peranan berbagai asosiasi tuna Indonesia seperti ATLI, ASTUIN, AP2HI, dan KTI menjadi penting. Keanggota nelayan serta eksportir tuna Indonesia dalam asosiasi-asosiasi tersebut merupakan salah satu upaya menekan biaya perdagangan yang harus ditanggung dalam memenuhi persyaratan dan standar

yang diberlakukan dalam memenuhi persyaratan dan standar yang diberlakukan oleh negara-negara pengimpor, terlebih karena masing-masing negara memiliki standar yang berbeda-beda sehingga biaya yang dibutuhkan akan menjadi lebih besar.

Dalam tulisan Oktavia membantu penulis dalam penyediaan data-data hambatan tarif dan non-tarif. Karena hambatan tarif ini mempengaruhi akan ekspor tuna Indonesia ke negara tujuan. Negara-negara yang memberlakukan tarif bea masuk adalah Jepang dan Uni Eropa. Dengan adanya tarif bea masuk ini memberatkan bagi negara pengekspor. Fokus dalam skripsi penulis tarif bea masuk juga menjadi hambatan bagi ekspor tuna Indonesia ke Jepang.

Referensi ketiga dari artikel yang berjudul *"Struktur Pasar dan Kedudukan Indonesia Pada Perdagangan Tuna Olahan Di Pasar Dunia, Jepang dan USA"*, oleh Sri Hidayati, Akademi Pertanian HKTI Banyumas, 2014. Dalam artikel ini Sri memfokuskan ekspor tuna ke Jepang dan USA, dan pengambilan data yang dilakukan dari tahun 1989 sampai 2012.

Dalam artikel ini target utama pasar ekspor tuna Indonesia adalah Jepang dan USA. Tuntutan masyarakat terhadap keamanan pangan, menjadikan negara importir menerapkan aturan terhadap produk impor. Peningkatan ekspor tuna harus didukung oleh peningkatan kuantitas, kualitas dan nilai tambah ikan tuna, sehingga perlu upaya terpadu agar usaha ekspor ikan tuna dapat terus berkembang dan mempunyai daya saing dalam menghadapi tantangan yang ada.

Jumlah negara yang melakukan ekspor tuna ke USA dan Jepang sejak tahun 1989-2012 sebanyak 102 dan 78 negara. Setelah diberlakukannya persyaratan mutu ikan yang diekspor di masing-masing negara tersebut, maka jumlah eksportir Jepang mengalami penurunan sedangkan di USA mengalami kenaikan. Namun demikian dengan adanya aturan tersebut, jumlah eksportir ke Jepang lebih besar (71,8% dibandingkan USA (46,07%). Indonesia maupun Thailand merupakan eksportir tetap di kedua negara tersebut.

Tahun 1995-2012, kedudukan Indonesia sebagai eksportir tuna olahan di pasar Jepang lebih baik dibandingkan pasar USA dan dunia. kedudukan Indonesia sebagai eksportir tuna olahan di Jepang sejak tahun 1995 adalah nomor dua setelah Thailand, sedangkan di pasar USA sejak tahun 2010 kedudukan Indonesia

mengalami penurunan yaitu menjadi peringkat keempat. Kedudukan Indonesia di pasar USA sejak tahun 1995-2011 lebih baik daripada pasar dunia, namun tahun 2012 menjadi eksportir ketiga setelah Thailand dan Spain.

Artikel yang ditulis Sri membantu penulis mengetahui tentang eksportir tuna ke Jepang, dan pengurangan eksportir ke Jepang setelah diberlakukannya persyaratan mutu ikan. Dalam artikel ini pembahasan mengenai ekspor tuna ke Jepang hanya sedikit tidak lengkap dan jurnal tersebut mengambil periode yang cukup panjang dari 1989-2012. Sedangkan focus penulis hanya pada periode 2010-2012 dan penulis hanya focus ke negara Jepang.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Diplomasi

Sir Ernest Satow sejak tahun 1922 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintah yang berdaulat, yang kadang kala diperluas dengan hubungan dengan negara jajahan-jajahannya. Sejalan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan actor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan actor-aktor lain berusaha menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, sampai menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas damai, dapat juga terjadi di dalam kondisi perang atau konflik bersejata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharannya dengan cara melakukan persuasi yang terus-menerus di tengah-tengah perubaha yang tengah berlangsung (Djelatik, 2008).

Menurut Sumaryo Suryokusumo, Diplomasi adalah kegiatan politik dan merupakan bagian dari kegiatan international yang saling berpengaruh dan kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan-tujuannya, melauai perwakilan diplomatic atau organ-organ

lainnya. Diplomasi berbicara tentang sejarah, system, dan filsafat politik, kebudayaan, kepentingan ekonomi, dan nilai-nilai ermis dari anggota masyarakat dunia. Tugas utama diplomasi adalah dapat memahami dan bertindak dengan cepat dan cermat dalam memperjuangkan kepentingan negaranya, khususnya di negara dimana ia ditempatkan (Syahmin, 2008).

Sementara itu menurut Nicholas, kualitas dan keberhasilan politik luar negeri tidak tergantung pada tujuan dan abstrak melainkan pada pelaksanaan diplomasi yang nyata melalui berbagai cara, yaitu dengan menyebarluaskan kebijakan yang diambil, menjelaskannya, dan merundingkan persetujuan-persetujuan yang menjamin keamanan negara, baik perang maupun damai. Diplomasi berusaha menciptakan kesesuaian dan mendamaikan perbedaan-perbedaan dengan melakukan mediasi dan negosiasi antarnegara dengan baik dan cerdas. Dalam hal ini, diplomasi Indonesia menerapkan pola "*intermestik*", yaitu diplomasi yang menyuarakan kepentingan nasional ke masyarakat internasional, dan mengomunikasikan perkembangan-perkembangan dalam negeri ke dunia internasional. Komunikasi ke dalam negeri bertujuan untuk membentengi kepentingan nasional serta mengambil langkah antisipasi dalam menghadapi arus tuntutan dunia (Syahmin, 2008).

Sebuah definisi yang paling dekat terkait dengan metode dan isi adalah "diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi, militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antara para pelaku negosiasi". Diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap pemerintah negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsensi atau mengirimkan ancaman.

Lord Strang mengartikan diplomasi sebagai pelaksanaan hubungan antarpemerintah dari berbagai negara melalui wakil-wakil yang ditunjuk oleh masing-masing negara. Menurut Rivier pengertian diplomasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu :

- a. Diplomasi sebagai ilmu dan seni dalam mewakili negara sambil berunding.
- b. Diplomasi sebagai seluruh upaya mewakili negara termasuk kementerian luar negeri dan atau seluruh agen politik suatu negara.

c. Dan diplomasi sebagai karir atau profesi seorang diplomat (Widodo, 2009).

Meskipun istilah diplomasi makin lama makin bias, namun jika dicermati dari berbagai tulisan dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian diplomasi merupakan sarana yang biasa dipakai oleh suatu negara untuk melaksanakan hubungan internasional. Secara khusus, pengertian diplomasi mengarah pada berbagai teknik dan prosedur yang lazim digunakan oleh negara dalam rangka melaksanakan hubungan dengan negara lain atau subjek hukum internasional bukan negara. Sedangkan urusan pokok diplomasi adalah negosiasi, yaitu *per-rembug-an* yang dilakukan antardiplomat secara damai untuk membela kepentingan negaranya masing-masing, dan kegiatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan politik luar negeri suatu negara (Widodo, 2009).

Tujuan utama diplomasi adalah untuk mencari cara penyelesaian damai dari masalah-masalah Internasional dan menciptakan harmoni antar negara-negara yang beragam (Djelatik, 2008). Suatu negara mengadakan hubungan diplomasi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari negara lain, menjaga hubungan dengan negara lain dan menjaga keserasian antar negara. Untuk mencapai tujuan diplomasi, setiap negara membutuhkan beberapa aspek yaitu kerjasama, penyesuaian dan penentangan. Dalam hal ini, kerjasama dan penentangan dapat dengan mudah dicapai dengan menggunakan jalur negosiasi yang pada akhirnya berakhir pada sebuah hasil. Jika negosiasi tidak berhasil maka perang adalah jalan alternatifnya.

Barry Fulton mengusulkan agar pelaksanaan diplomasi ditinjau kembali agar dapat mengikuti perubahan-perubahan global yang terjadi. Diplomasi pada era modern dapat dilaksanakan tidak hanya oleh Departemen Luar Negeri, akan tetapi juga oleh kegiatan perdagangan, pertanian dan organisasi-organisasi lainnya yang terkait dengan masalah-masalah internasional dan menerapkan manajemen perubahan (Djelatik, 2008).

I.6.2 Perdagangan Internasional

Perkembangan globalisasi yang berlangsung dalam beberapa dasawarsa terakhir telah menyebabkan berbagai perubahan yang fundamental dalam tatanan perekonomian dunia baik dalam sector keuangan maupun perdagangan. Perubahan

tersebut khususnya di bidang perdagangan telah mendorong sebagian besar negara di dunia ini untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan praktek perdagangan internasional. Namun dalam perkembangannya, kebijakan dan peraturan perdagangan yang dikeluarkan suatu negara seringkali bertentangan dengan mekanisme pasar yang tidak sesuai dengan prinsip perdagangan bebas sehingga menghambat penetrasi pasar bagi pelaku bisnis negara lain. Kondisi ini telah memicu peningkatan persaingan perdagangan antara negara sebagai konsekuensi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing negara tersebut dalam rangka memperbaiki daya saing perekonomiannya (Arifin, Rae, & Joseph, 2004).

Seiring dengan perkembangan perdagangan internasional, teori-teori yang mendasari perdagangan internasional juga mengalami perkembangan dari teori tradisional seperti yang diperkenalkan oleh Adam Smith, David Ricardo, dan Heckscher-Ohlin sampai dengan teori lain yang lebih modern. Secara umum teori perdagangan internasional yang tradisional memperhatikan bahwa perdagangan bebas akan meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang terlibat dalam perdagangan tersebut dengan asumsi setiap negara mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara lainnya. Perdagangan antar negara akan membawa dunia pada penggunaan sumber daya langka secara lebih efisien dan setiap negara dapat melakukan perdagangan bebas yang menguntungkan dengan melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki tersebut. Teori perdagangan secara umum memperlihatkan bahwa perdagangan internasional yang bebas akan membawa manfaat bagi negara yang berdagang dan dunia (Arifin, Rae, & Joseph, 2004). Perdagangan Internasional dapat diartikan juga sebagai transaksi dagang antara ekonomi negara yang satu dengan negara yang lain baik dalam barang maupun jasa.

Menurut Adam Smith, perdagangan antara dua negara didasarkan pada keunggulan absolut. Ketika satu negara lebih efisien daripada yang lain dalam produksi satu komoditas tetapi kurang efisien daripada negara lain dalam memproduksi komoditas yang kedua, kedua negara dapat mendapatkan manfaat dengan masing-masing mengkhususkan diri dalam produksi komoditas yang memiliki keunggulan absolut dan bertukar hasil dengan negara lain untuk komoditas yang memiliki kelemahan absolut. Dengan proses ini, sumber daya

digunakan dengan cara yang paling efisien dan hasil dari kedua komoditas akan naik. Peningkatan dalam hasil komoditas keduanya merupakan ukuran keuntungan dari spesialisasi dalam produksi yang tersedia untuk dibagi antara kedua negara melalui perdagangan (Salvatore, 2014). Adam Smith menyarankan perdagangan bebas. Masing-masing negara berspesialisasi pada komoditi yang bias berproduksi dengan yang lebih efisien. Komoditi yang kurang efisien jika di produksi di dalam negeri harus di impor. Semua negara didunia akan mendapat keuntungannya dari perdagangan luar negeri.

Keunggulan komperatif merupakan modifikasi yang dilakukan oleh David Ricardo terhadap keunggulan absolut Adam Smith. Meskipun suatu negara mengalami kerugian atau ketidak unggulan absolut dalam memproduksi kedua komoditi jika dibandingkan negara lain, tetapi masih bias memproduksi dan mengekspor komoditi yang mempeunyai kerugian absolut lebih besar (Sasono, 2013). Meskipun suatu negara atau perekonomian dapat menghasilkan berbagai macam barang dan jasa dalam produksi domestiknya, namun lebih baik apabila lebih mengkonsentrasikan pada area produksi dimana yang lebih menelan biaya yang efisien dibandingkan perekonomian pesaingnya.

Indonesia merupakan negara dengan potensi tuna tertinggi di dunia. Didukung dengan wilayah geografis yang mencangkup dua samudra kunci untuk perikanan tuna yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia menjadi negara penting bagi perikanan tuna global baik dari sisi sumberdaya, habitat dan juga perdagangan. Dalam ekspor tuna ke Jepang yang menjadi andalan Indonesia adalah jenis ikan tuna sirip biru. Harga lelang yang ditawarkan Jepang untk setiap satu ekor ikan tuna sirip biru mencapai Rp. 3,2 miliar dengan berat badan 70-80 kg per ekornya (detik.com). mayoritas ikan tuna sirip biru digunakan sebagai bahan makanan sashimi di Jepang dengan harga cukup mahal dan mewah.

I.7 Metode Penelitian

I.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu mekanisme dan proses dalam suatu penelitian dimana

peneliti memulai berfikir secara induktif, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati tersebut. Peneliti menganalisa berdasarkan fakta mengenai penurunan ekspor tuna Indonesia ke Jepang periode 2010-2014.

I.7.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif desain deskriptif, yaitu penelotoan yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993). Menurut Meloeng, kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk meemahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, otivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pda suatu koteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian dengan judul Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Ekspor Tuna ke Jepang periode 2010 – 2014 akan mendeskripsikan bagaimana upaya Indonesia menghadapi hambatan ekspor tuna dan upaya Indonesia dalam meningkatkan ekspor tuna.

I.7.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pertama data primer berkaitan dengan diplomasi antara Indonesia dan Jepang terutama dalam meningkatkan ekspor tuna ke Jepang periode 2010-2014. Data yang dibutuhkan seperti penyebab yang membuat naik turun ekspor tuna Indonesia ke Jepang periode 2010-2014, hambatan dan factor-faktor yang memperngaruhi ekspor tuna ke Jepang. Kedua data sekunder yang dibutuhkan penulis sebagai data pendukung tentang ekspor tuna Indonesia, impor tuna Jepang dan hubungan Indonesia dan Jepang dalam ekspor tuna periode tahun 2010-2014.

I.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Data Primer : teknik pengumpulan data ini dilakukan wawancara ke Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Asosiasi Tuna Indonesia serta pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan data-data resmi dalam menganalisis penelitian mengenai ekspor ikan tuna Indonesia ke Jepang.

Data Sekunder : teknik data ini melalui studi pustaka dan buku, jurnal, artikel-artikel, laporan yang terkait tentang ekspor ikan tuna Indonesia ke Jepang.

I.7.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis atau fenomena yang terjadi dalam penelitian bersifat deskriptif analisis. Sehingga suatu permasalahan di jelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang ditemukan berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan. Analisa data dilakukan sesuai dengan kerangka pemikiran yang digunakan agar data yang diperoleh dari pengamatan dapat dijelaskan secara jelas. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara yang kemudian diklasifikasi dan dikumpulkan untuk digunakan dalam proses penyusunan penelitian serta untuk menjawab pertanyaan penelitian.

I.8 Alur Pemikiran



I.9 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaan mengenai permasalahan dalam penelitian ini, penulis membagi penelitian ini ke dalam 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematik penulisan.

BAB II DINAMIKA PERDAGANGAN TUNA INDONESIA - JEPANG

Bab kedua akan membahas bagaimana hubungan kerjasama Indonesia – Jepang dalam perdagangan dan kegiatan ekspor impor.

BAB III DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA – JEPANG UNTUK MENINGKATKAN EKSPOR TUNA KE JEPANG PERIODE 2010 - 2014

Bab ini menjelaskan bagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekspor tuna ke Jepang periode 2010 – 2014.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna masukan terkait permasalahan tersebut.

